Jurnal Riset Ilmu Pendidikan
Vol. 6, No. 3, Agustus 2026, pp. 59~65

Analysis of the values of national defense and social responsibility in the implementation of work safety culture in MSMEs in Medan City

Istifani Nasution[1], Wasiyem[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: istifaninasution04@gmail.com; wasiyem@uinsu.ac.id

ABSTRAK

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun implementasi budaya keselamatan kerja masih relatif rendah, terutama pada sektor informal. Penelitian ini bertujuan menganalisis internalisasi nilai bela negara dan tanggung jawab sosial dalam penerapan budaya keselamatan kerja (*safety culture*) pada UMKM di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan, yaitu pemilik UMKM, pekerja, dan pendamping UMKM, yang didukung observasi lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai bela negara dimaknai sebagai perilaku kerja yang jujur, disiplin, patuh terhadap kewajiban, serta berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Nilai tersebut mendorong tumbuhnya tanggung jawab sosial dalam bentuk pemberian upah di atas standar, bantuan biaya pengobatan pekerja, dan pengelolaan limbah usaha secara bertanggung jawab. Namun, budaya keselamatan kerja masih belum terlembagakan secara formal, ditandai dengan belum adanya SOP K3, keterbatasan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), minimnya pelatihan K3, dan prosedur tanggap darurat yang masih sederhana. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai bela negara dan tanggung jawab sosial merupakan modal sosial yang dapat mendukung penguatan budaya keselamatan kerja, namun memerlukan intervensi struktural melalui pembinaan, pelatihan, dan standardisasi praktik K3 pada UMKM.

Kata Kunci: bela negara; budaya keselamatan kerja; safety culture; social responsibility; UMKM

ABSTRACT

MSMEs play a strategic role in the national economy, but the implementation of occupational safety culture remains relatively low, especially in the informal sector. This study aims to analyze the internalization of national defense values and social responsibility in the implementation of occupational safety culture in MSMEs in Medan City. The study used a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews with three informants: MSME owners, workers, and MSME assistants, supported by field observations and documentation. The results show that national defense values are interpreted as honest work behavior, discipline, compliance with obligations, and contribution to the local economy. These values encourage the growth of social responsibility in the form of above-standard wages, assistance with worker medical expenses, and responsible business waste management. However, the occupational safety culture has not been formally institutionalized, marked by the absence of OSH Standard Operating Procedures (SOPs), limited use of Personal Protective Equipment (PPE), minimal OSH training, and rudimentary emergency response procedures. This study confirms that the values of national defense and social responsibility are social capital that can support the strengthening of occupational safety culture, but require structural intervention through coaching, training, and standardization of OHS practices in MSMEs.

Keyword: national defense; occupational safety culture; safety culture; social responsibility; MSMEs

Corresponding Author:
Wasiyem,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. William Iskandar Ps. V, Sumatera Utara 20371, Indonesia
Email: wasiyem@uinsu.ac.id

1. INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Sektor ini tercatat menyumbang sekitar 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sebagian besar tenaga kerja di berbagai daerah (Laulit et al., 2023). Di Kota Medan, geliat UMKM juga terus tumbuh. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, tercatat sebanyak 38.343 pelaku UMKM yang terdaftar dalam Sistem Pendataan Koperasi dan UMKM (SIMDAKOP) hingga akhir tahun 2022, dengan sebagian besar bergerak di sektor usaha mikro (Pemerintah Kota Medan, 2023).

Di balik kontribusi ekonominya yang besar, sektor UMKM secara umum masih menghadapi tantangan serius dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemilik dan pekerja UMKM cenderung kurang peduli serta minim informasi mengenai pentingnya K3, sehingga risiko kecelakaan kerja dan ketidaknyamanan dalam bekerja relatif tinggi (Laulit et al., 2023; Monoarfa & Miolo, 2022; Akbar et al., 2025). Kondisi ini semakin krusial mengingat keterbatasan sumber daya UMKM untuk membangun sistem manajemen keselamatan kerja secara formal sebagaimana lazim diterapkan pada perusahaan berskala besar (Udara et al., 2023).

Di sisi lain, nilai bela negara sesungguhnya tidak hanya termanifestasi dalam bentuk pertahanan fisik atau militer, tetapi juga dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi dalam menjalankan profesi maupun usaha sehari-hari (Soepandji & Farid, 2018). Kesadaran bela negara yang tumbuh di kalangan pelaku usaha kecil berpotensi mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab sebagai wujud kontribusi nyata terhadap ketahanan sosial dan ekonomi bangsa (Alhudawi et al., 2021; Rahayu, 2021). Nilai-nilai tersebut juga berkelindan dengan konsep *social responsibility*, yang meskipun secara historis lebih banyak diasosiasikan dengan korporasi besar, kini mulai diadopsi secara sederhana oleh sejumlah pelaku UMKM dalam bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan lingkungan sekitar usahanya (Kusumawardhany, 2022; Hasanah et al., 2024; Mahdaniah, 2023).

Sayangnya, kajian yang secara khusus menghubungkan nilai bela negara dan tanggung jawab sosial dengan praktik budaya keselamatan kerja pada level UMKM masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks UMKM di Kota Medan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana nilai bela negara dan tanggung jawab sosial terinternalisasi dalam penerapan budaya keselamatan kerja pada UMKM di Kota Medan melalui penggalian pengalaman dan perspektif tiga informan kunci, yaitu pemilik UMKM, pekerja, dan perwakilan masyarakat atau instansi pembina. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi penguatan program pembinaan UMKM yang berorientasi pada keselamatan kerja dan tanggung jawab sosial berbasis nilai-nilai kebangsaan.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena internalisasi nilai bela negara, tanggung jawab sosial, dan penerapan budaya keselamatan kerja pada UMKM secara kontekstual (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, terdiri atas tiga informan yang mewakili perspektif berbeda dalam ekosistem UMKM, yaitu: (1) pemilik/pengelola UMKM sebagai pihak yang menentukan kebijakan usaha; (2) pekerja/karyawan UMKM sebagai pihak yang menjalankan aktivitas produksi sehari-hari; dan (3) tokoh masyarakat atau perwakilan instansi pembina (misalnya pendamping Dinas Koperasi dan UKM setempat) sebagai pihak yang memahami konteks sosial dan pembinaan UMKM di wilayah tersebut. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (a) wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur; (b) observasi lapangan nonpartisipatif terhadap kondisi tempat kerja dan praktik keselamatan yang berlangsung; serta (c) dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka serta direkam setelah memperoleh persetujuan dari informan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Tema yang dianalisis meliputi tiga kategori utama, yaitu: (1) pemahaman dan internalisasi nilai bela negara; (2) bentuk tanggung jawab sosial UMKM; dan (3) penerapan budaya keselamatan kerja (*safety culture*). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari ketiga informan terhadap hasil observasi lapangan. Tahapan pelaksanaan penelitian secara garis besar disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Profil Informan

Penelitian ini melibatkan tiga informan yang dipilih berdasarkan kriteria keterwakilan perspektif dalam ekosistem UMKM. Profil singkat masing-masing informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan

No.	Inisial/Nama	Peran/Jabatan	Usia	Jenis Usaha/Pekerjaan	Lama Terlibat
1	Inisial U	Pemilik UMKM	42 tahun	Usaha bengkel las dan produksi pagar besi	8 tahun
2	Inisial B	Pekerja/Karyawan UMKM	29 tahun	Karyawan bagian pengelasan dan *finishing*	3 tahun
3	Inisial H	Tokoh Masyarakat/Pendamping UMKM	51 tahun	Pendamping UMKM kelurahan setempat	6 tahun

B. Pemahaman dan Internalisasi Nilai Bela Negara pada Pelaku UMKM

Hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan gambaran mengenai pemahaman nilai bela negara di kalangan pelaku UMKM.

Ketiga informan secara konsisten memaknai bela negara bukan dalam pengertian militer, melainkan sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam menjalankan profesi dan usaha sehari-hari. Inisial U, selaku pemilik UMKM, memandang bela negara sebagai kerja jujur, kepatuhan membayar pajak, dan penyediaan lapangan kerja bagi warga sekitar yang, menurutnya, turut menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Pemaknaan serupa juga diungkapkan oleh Inisial B sebagai pekerja, yang mengaitkan kerja rajin dan disiplin waktu dengan bentuk cinta tanah air karena berkontribusi terhadap kemajuan usaha lokal.

Kedua informan juga sepakat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan usaha, termasuk konsistensi dalam menjaga kualitas produk, berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat pada produk lokal sehingga secara tidak langsung memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Perspektif Inisial H selaku pendamping UMKM memperkuat gambaran tersebut pada tingkat yang lebih luas. Menurutnya, tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab pelaku UMKM di wilayahnya secara umum cukup baik serta ditopang oleh semangat gotong royong, meskipun sebagian pelaku usaha masih kurang tertib dalam aspek administrasi formal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soepandji dan Farid (2018), bela negara dapat dimaknai secara luas sebagai sikap dan perilaku warga negara dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan profesi masing-masing demi kepentingan bangsa.

Hal tersebut secara eksplisit tergambar dalam pernyataan Inisial U berikut:

"Menurut saya, bela negara itu nggak melulu soal angkat senjata, Dek. Kalau saya sebagai pengusaha kecil, ya bela negara itu dengan cara kerja jujur, bayar pajak, dan kasih kerjaan buat orang sekitar sini. Itu juga bentuk kita jaga negara, biar ekonomi warga jalan." (Inisial U, Pemilik UMKM)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Inisial B:

"Kalau menurut saya, kerja rajin dan nggak korupsi waktu kerja itu juga bentuk cinta tanah air karena kita ikut bikin usaha lokal maju." (Inisial B, Pekerja/Karyawan UMKM)

C. Penerapan Budaya Keselamatan Kerja (Safety Culture)

Budaya keselamatan kerja pada UMKM yang menjadi subjek penelitian ini dianalisis berdasarkan sejumlah indikator yang lazim digunakan dalam literatur K3, mencakup komitmen pimpinan, komunikasi K3, pelatihan dan pengetahuan pekerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta prosedur tanggap darurat (Laulit et al., 2023; Silviani et al., 2022; Krisyanti & Budiono, 2023). Kondisi penerapan masing-masing indikator pada lokasi penelitian dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Penerapan Budaya Keselamatan Kerja (Safety Culture) pada UMKM

No.	Indikator *Safety Culture*	Kondisi di Lapangan	Keterangan
1	Komitmen Pemilik/Pimpinan terhadap K3	Pemilik terlihat aktif mengingatkan pekerja untuk memakai kacamata las selama observasi berlangsung.	Belum terdapat SOP tertulis; komitmen masih bersifat lisan.
2	Komunikasi dan Sosialisasi K3 kepada Pekerja	Arahan K3 disampaikan secara lisan setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai.	Tidak terdapat media visual berupa poster atau rambu K3 di lokasi.

No.	Indikator *Safety Culture*	Kondisi di Lapangan	Keterangan
3	Pelatihan dan Pengetahuan K3 Pekerja	Pekerja memahami dasar penggunaan APD, tetapi belum pernah mengikuti pelatihan formal.	Pengetahuan diperoleh dari pekerja senior dan pengalaman kerja.
4	Ketersediaan dan Penggunaan APD	Tersedia sarung tangan dan kacamata las, tetapi sepatu *safety* belum tersedia.	Penggunaan APD belum konsisten pada seluruh pekerja.
5	Prosedur Penanganan Kecelakaan/Keadaan Darurat	Kotak P3K sederhana tersedia; penanganan darurat mengandalkan klinik terdekat.	Belum terdapat jalur evakuasi atau APAR di lokasi.
6	Kebersihan dan Tata Letak Area Kerja	Area kerja cukup rapi, tetapi sisa material besi teramati berserakan di sebagian sudut bengkel.	Berpotensi menimbulkan bahaya tersandung (*tripping hazard*).

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa budaya keselamatan kerja pada UMKM yang diteliti masih berada pada tahap awal dan belum terlembagakan secara formal. Pada aspek komitmen pimpinan, hasil observasi lapangan mengonfirmasi pernyataan Inisial U dalam wawancara. Pemilik usaha secara aktif mengingatkan pekerja untuk memakai kacamata las, tetapi komitmen tersebut belum dituangkan dalam prosedur operasional standar (SOP) tertulis sehingga masih sangat bergantung pada kehadiran dan inisiatif pribadi pemilik.

Pola serupa terlihat pada aspek komunikasi K3. Arahan K3 disampaikan secara lisan setiap pagi tanpa didukung media visual, seperti poster atau rambu keselamatan. Kondisi tersebut selaras dengan temuan Laulit et al. (2023) bahwa UMKM pada umumnya belum memiliki sistem komunikasi K3 yang terstandardisasi.

Dari sisi pelatihan dan pengetahuan, pekerja memahami dasar penggunaan APD, tetapi pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman dan arahan pekerja senior, bukan melalui pelatihan formal. Kondisi ini juga berkaitan dengan keterbatasan modal untuk menyediakan APD secara lengkap, sebagaimana disampaikan oleh Inisial U. Ketersediaan APD pun masih bersifat parsial. Sarung tangan dan kacamata las telah tersedia, tetapi sepatu *safety* belum tersedia, dan penggunaan APD belum konsisten pada seluruh pekerja. Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Inisial B, yang menyebutkan bahwa sebagian rekan kerjanya enggan memakai APD karena dianggap merepotkan.

Insiden percikan api las yang dialami oleh rekan Inisial B, yang ditangani dengan penyiraman air dan kunjungan ke klinik terdekat tanpa prosedur baku, memperlihatkan bahwa penanganan keadaan darurat masih bersifat reaktif. Penanganan tersebut masih mengandalkan fasilitas kesehatan terdekat dan belum didukung protokol tanggap darurat internal, seperti jalur evakuasi atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Kondisi ini konsisten dengan temuan Krisyanti dan Budiono (2023) serta Silviani et al. (2022), yang menunjukkan bahwa tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja industri kecil sering kali berakar pada lemahnya sistem K3 formal, bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian individu. Terakhir, meskipun tata letak area kerja secara umum cukup rapi, masih ditemukan sisa material besi yang berserakan di sebagian sudut bengkel. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya tersandung (*tripping hazard*) dan mengindikasikan perlunya perhatian tambahan terhadap aspek penataan dan kebersihan area kerja (*housekeeping*).

D. Bentuk Tanggung Jawab Sosial UMKM terhadap Pekerja dan Masyarakat

Tanggung jawab sosial pada UMKM umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar karena implementasinya lebih bersifat informal dan berbasis pada relasi personal antara pemilik usaha, pekerja, dan masyarakat sekitar (Kusumawardhany, 2022). Merujuk pada prinsip *triple bottom line* yang mencakup *profit, people,* dan *planet*, tanggung jawab sosial UMKM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.

Dimensi ekonomi mencakup kesejahteraan dan kepastian penghasilan pekerja. Dimensi sosial mencakup kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja serta keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar. Sementara itu, dimensi lingkungan mencakup pengelolaan limbah usaha (Hasanah et al., 2024).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial pada UMKM yang diteliti terwujud dalam bentuk-bentuk informal yang berbasis pada relasi personal antara pemilik, pekerja, dan lingkungan sekitar. Pada dimensi ekonomi, Inisial U mengaku memberikan upah di atas Upah Minimum Kota (UMK) serta uang makan tambahan bagi pekerja yang lembur, meskipun belum terdapat jaminan sosial resmi berupa BPJS Ketenagakerjaan yang disediakan oleh usaha.

Kondisi tersebut turut dibenarkan oleh Inisial B, yang merasa bahwa kesejahteraannya cukup diperhatikan, terutama melalui pemberian kelonggaran waktu istirahat ketika mengalami kelelahan. Meskipun demikian, ia juga menegaskan bahwa belum terdapat jaminan kesehatan resmi bagi pekerja.

Pada dimensi sosial, bentuk kepedulian pemilik terhadap pekerja juga terlihat ketika pekerja mengalami sakit. Dalam kondisi tersebut, Inisial U membantu biaya pengobatan secara langsung meskipun belum terdapat skema formal yang mengaturnya. Pada tingkat yang lebih luas, Inisial H menambahkan bahwa semangat gotong royong antarpelaku UMKM di wilayahnya juga diwujudkan melalui iuran warga ketika

terdapat anggota masyarakat yang tertimpa musibah. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa jaminan kerja formal bagi pekerja UMKM masih jarang ditemukan.

Pada dimensi lingkungan, Inisial U menjelaskan bahwa sisa besi dari proses produksi tidak dibuang sembarangan, tetapi dikumpulkan dan dijual kembali kepada pengepul barang rongsokan. Praktik tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi risiko bahaya limbah logam di lingkungan sekitar usaha.

Secara keseluruhan, pola tanggung jawab sosial yang ditemukan sejalan dengan karakteristik yang dikemukakan oleh Kusumawardhany (2022), yaitu bahwa tanggung jawab sosial UMKM cenderung berskala kecil, tidak terdokumentasi, dan lebih mengandalkan inisiatif personal pemilik usaha dibandingkan dengan kebijakan formal tertulis.

E. Keterkaitan Nilai Bela Negara, Tanggung Jawab Sosial, dan Budaya Keselamatan Kerja

Berdasarkan temuan pada ketiga aspek tersebut, terlihat adanya keterkaitan konseptual antara nilai bela negara, tanggung jawab sosial, dan budaya keselamatan kerja pada UMKM.

Kesadaran bela negara yang dimiliki oleh Inisial U dan Inisial B, yang dimaknai sebagai kerja jujur, disiplin, dan kontribusi terhadap perekonomian lokal, tampak menjadi landasan sikap bagi bentuk-bentuk tanggung jawab sosial informal yang mereka praktikkan. Bentuk tersebut mencakup pemberian upah di atas UMK, bantuan biaya pengobatan, dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab.

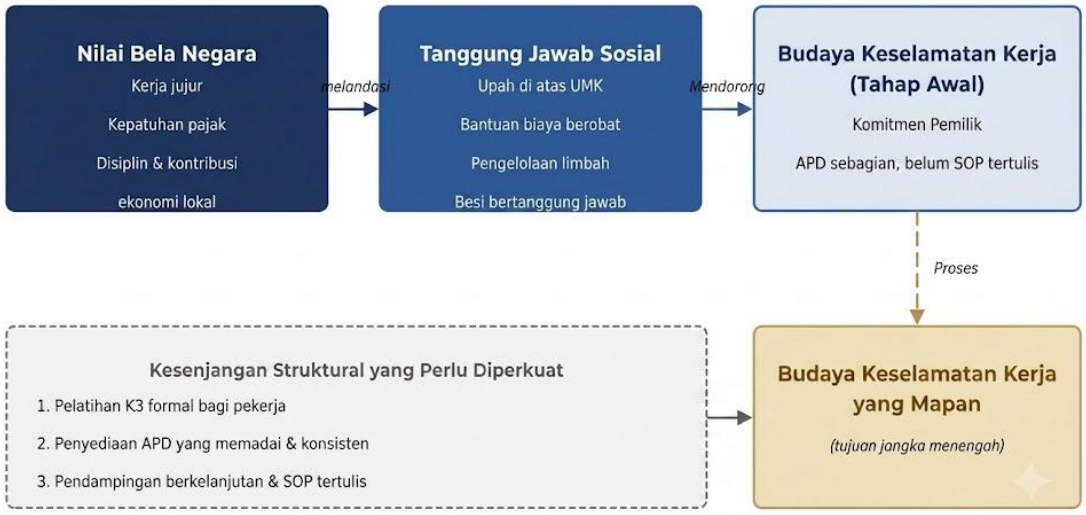
Tanggung jawab sosial tersebut selanjutnya turut mendorong perhatian awal terhadap keselamatan pekerja, sebagaimana terlihat dari inisiatif pemilik untuk secara konsisten mengingatkan pekerja mengenai penggunaan APD setelah terjadinya insiden kecelakaan kerja sebelumnya. Namun demikian, keterkaitan ketiga nilai tersebut belum sepenuhnya termanifestasi dalam sistem K3 yang formal dan terstandardisasi.

Komitmen yang masih bersifat lisan dan berbasis pada inisiatif personal pemilik usaha belum cukup untuk menjamin konsistensi penerapan keselamatan kerja pada seluruh pekerja. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan tingkat kepatuhan dalam penggunaan APD antarp pekerja, sebagaimana diungkapkan oleh Inisial B.

Dengan demikian, nilai bela negara dan tanggung jawab sosial pada UMKM yang diteliti berperan sebagai modal sikap (*dispositional capital*) yang mendorong kepedulian terhadap keselamatan kerja. Namun, modal sikap tersebut masih memerlukan penguatan struktural melalui pelatihan, penyediaan APD yang memadai, dan pendampingan berkelanjutan agar dapat bertransformasi menjadi budaya keselamatan kerja yang mapan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan nilai-nilai kebangsaan pada tingkat UMKM dapat menjadi salah satu strategi nonregulatif untuk mendorong perbaikan praktik K3 di sektor informal, yang selama ini sulit dijangkau hanya melalui pendekatan regulasi formal (Monoarfa & Miolo, 2022; Udara et al., 2023).

Keterkaitan antara ketiga konsep tersebut, sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.5, dirangkum secara skematis pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Keterkaitan Nilai Bela Negara, Tanggung Jawab Sosial, dan Budaya Keselamatan Kerja pada UMKM

4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai bela negara pada pelaku UMKM yang diteliti dipahami secara luas sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, seperti bekerja secara jujur, disiplin dalam menjalankan usaha, mematuhi kewajiban membayar pajak, dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, bukan semata-mata dalam pengertian pertahanan fisik atau militer. Bentuk tanggung jawab sosial yang dipraktikkan bersifat informal dan berbasis pada relasi personal, mencakup dimensi ekonomi, seperti pemberian upah di atas UMK dan bantuan biaya pengobatan; dimensi sosial, seperti gotong royong dan kepedulian antarwarga; serta dimensi lingkungan, berupa pengelolaan limbah besi secara bertanggung jawab.

Sementara itu, penerapan budaya keselamatan kerja masih berada pada tahap awal. Komitmen pemilik terhadap K3 telah terlihat, tetapi masih bersifat lisan dan belum terlembagakan dalam prosedur operasional standar (SOP) tertulis. Ketersediaan dan penggunaan APD juga masih parsial dan belum konsisten. Selain itu, pekerja belum pernah mengikuti pelatihan K3 formal, sedangkan prosedur tanggap darurat masih mengandalkan fasilitas kesehatan terdekat tanpa didukung protokol internal yang baku. Ketiga temuan tersebut menegaskan bahwa kesadaran bela negara dan tanggung jawab sosial yang tumbuh di kalangan pelaku UMKM belum secara otomatis menghasilkan budaya keselamatan kerja yang matang. Oleh karena itu, diperlukan intervensi struktural untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu: (1) integrasi materi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan; (2) penguatan narasi bela negara nonmiliter yang menyasar pelaku usaha mikro dan kecil, misalnya melalui pelatihan kedisiplinan kerja dan tanggung jawab profesi; serta (3) pendampingan berkelanjutan bagi UMKM dalam mengembangkan bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan skala usahanya tanpa membebani struktur biaya operasional yang terbatas. Penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas disarankan untuk memperkuat keteralihan temuan pada konteks UMKM yang berbeda.

Ringkasan ketiga rekomendasi tersebut beserta sasaran dan pemangku kepentingan terkait disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Rekomendasi Program Pembinaan UMKM

No.	Rekomendasi	Sasaran	Pihak Terkait
1	Integrasi materi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke dalam program pembinaan UMKM	Pemilik dan pekerja UMKM sektor informal, misalnya bengkel las	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan
2	Penguatan narasi bela negara nonmiliter melalui pelatihan kedisiplinan kerja dan tanggung jawab profesi	Pelaku usaha mikro dan kecil	Instansi pembina UMKM, akademisi, dan komunitas usaha
3	Pendampingan berkelanjutan untuk mengembangkan bentuk tanggung jawab sosial sesuai dengan skala usaha	UMKM dengan keterbatasan struktur biaya operasional	Pendamping UMKM tingkat kelurahan/kecamatan dan lembaga swadaya masyarakat

REFERENCES

Aghniya, S. N., Sari, N. C., Sundari, S., & Hasibuan, A. (2025). Implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencegah kecelakaan kerja pada industri keripik singkong Tuntungan. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan, 3*(2), 347–351. https://doi.org/10.71456/jik.v3i2.1299

Akbar, P., Adnyani, I. A. S., & Wiryajati, I. K. (2025). Pengaruh penerapan rekayasa teknik terhadap peningkatan kinerja K3 pada UMKM keripik singkong di Desa Guri. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 13*(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6601

Alhudawi, U., Simatupang, E., & Rachman, F. (2021). Membangun kesadaran bela negara masyarakat pedesaan berbasis nilai kearifan lokal. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 5*(2), 529.

Bilqis, K., Sultan, M., & Ramdan, I. M. (2021). Hubungan antara budaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan perilaku tidak aman pekerja konstruksi di PT X Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM), 3*(1), 19–28. http://dx.doi.org/10.30872/jkmm.v3i1.6271

Diansyah, F., & Fitri, A. N. (2023). Program CSR PT Djarum Kudus dalam membangun citra perusahaan. *Journal of Public Relations, 1*(1).

Febriana, A., Hapsari, R. K. M., Heryyanoor, H., Hikmah, N., Putri, H., Arifudin, M. N., ... Anwar, L. R. (2025). Empowerment of salted fish sellers' groups in Sungai Batang Ilir Village. *Jurnal Medika: Medika, 4*(4), 1564–1572. https://doi.org/10.31004/27v9nt24

Fitriani, H., & Putra, I. Z. (2022). Pengaruh kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja karyawan PT Hutama Karya. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil, 12*(1), 1–13. https://doi.org/10.24127/tp.v12i1.2317

Hasanah, I., Matondang, K. A., Sari, G., & Akbar, M. A. (2024). Implementation of corporate social responsibility (CSR) on changes in profitability at PT Unilever Tbk Indonesia. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3*(1), 341–348. https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1513

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data UMKM Indonesia 2023*.

Krisyanti, N., & Budiono, N. D. P. (2024). Pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap unsafe action pada pekerja di PT X Divisi Fabrikasi Baja. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal), 9*(2). https://doi.org/10.51933/health.v9i2.1766

Kusumawardani, A. F. (2024). Pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja bagian produksi industri fabrikasi baja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 19*(4), 24–31. https://doi.org/10.26714/jkmi.19.4.2024.24-31

Kusumawardhany, S. I. (2022). Bentuk tanggung jawab sosial pada UMKM industri tahu di Kabupaten Kediri. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, 2*(1), 53–67. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i1.106

Laulit, N. B., Winata, W., & Vinchen, H. (2023). Penerapan manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3): Studi kasus di Toko Aneka Karya Kusen Batam. *Jurnal JUKIM, 2*(1), 100–106. https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.448

Maharani, S. P., Fauzi, A., & Setyawati, N. W. (2025). Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan kerja, dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mega Kargo Logistik. *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan, 1*(4), 252–274. https://doi.org/10.63217/fibonacci.v1i4.126

Mahdaniah, S. B. Y. (2023). Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat Kecamatan Bulik, Kalimantan Tengah. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, 5*(4). https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18695

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Monoarfa, V., & Miolo, R. N. B. (2022). Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menggunakan metode HIRARC pada UMKM pabrik tahu. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, 2*(1), 1–6. https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i1.41

Muafiq, R. (2021). Pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi, 7*(1), 27–39. https://doi.org/10.35308/jts-utu.v7i1.3031

Pemerintah Kota Medan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. (2023). *Rekapitulasi jumlah UMKM terdaftar SIMDAKOP Kota Medan tahun 2022*.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2012).

Puspitasari, S. (2021). Pentingnya realisasi bela negara terhadap generasi muda sebagai bentuk cinta tanah air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development, 3*(1), 72–79. https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.43

Rahayu, S. K. (2021). Penguatan kesadaran bela negara pada remaja milenial menuju Indonesia emas. *Pedagogika, 12*(2), 134–151. https://doi.org/10.37411/pedagogika.v12i2.711

Silviani, D., Savitri, C., & Pertiwi, W. (2022). Pengaruh pelatihan K3 dan kepemimpinan terhadap perilaku keselamatan kerja pada PT Trigunapratama Abadi. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 3*(1), 21–44. https://doi.org/10.32585/jbfe.v3i1.5690

Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 48*(3), 436–456.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suparwo, A., Suhendi, H., & Shobary, M. N. (2019). Pengelolaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada UMKM Bandung Indo Garmen. *Jurnal Khatulistiwa Informatika, 2*(1), 10–20. https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i1.4855

Udara, G. M., Handayani, R., Handayani, P., & Irfandi, A. (2023). Identifikasi bahaya dan risiko K3 pada UMKM pembuatan tahu UG Priangan di Bojongsari tahun 2023. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, 1*(4), 181–191. https://doi.org/10.55606/termometer.v1i4.2460

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (1970).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002).